

BAB I

PENDAHULUAN

Permasalahan ataupun konflik yang berkaitan dengan sengketa wilayah, pemberontakan, ataupun gerakan separatisme bukanlah merupakan suatu permasalahan baru dalam ranah hubungan internasional. Oleh karenanya, dalam mengatasi permasalahan yang seolah terus muncul dari generasi ke generasi ini, banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dengan mendirikan organisasi internasional yang didalamnya terdiri dari negara-negara yang sepakat untuk melakukan kerjasama demi kepentingan nasional dan tujuan bersama. Pada bagian pendahuluan ini, penulis akan berusaha untuk menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, dan juga untuk membantu pembaca dalam mendapatkan kemudahan pemahaman dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai konflik yang terjadi di Transnistria, terdapat satu organisasi yang menarik untuk dibahas mengenai perannya dalam membantu menyelesaikan permasalahan ini. Organisasi tersebut ialah *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE) atau yang jika kita terjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa. OSCE merupakan sebuah organisasi kerjasama antar-pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan terbesar di dunia. Berdasarkan pada yang tertulis dalam website resmi, OSCE beranggotakan 57 negara, yang tergabung dari berbagai macam kawasan seperti Amerika Utara, Asia, dan Eropa. OSCE menjadi sebuah organisasi yang berusaha untuk membangun dialog antar negara-negara yang memiliki permasalahan konflik, baik itu konflik internal maupun internasional. Selain itu OSCE juga memiliki tujuan untuk mewujudkan *stability, peace, dan democracy* bagi negara-negara anggotanya (OSCE, 2020). OSCE juga menangani berbagai macam masalah yang terkait dengan control senjata, kontra-terorisme, hak asasi manusia, minoritas, separatisme, dan berbagai macam permasalahan yang terkait dengan ekonomi dan lingkungan hidup.

OSCE sendiri didirikan pada tahun 1973 dengan nama awal *Conference on Security and Cooperation in Europe* (CSCE). Konferensi ini ditujukan untuk melakukan pembahasan dan negosiasi terkait dengan perang dingin yang terjadi pada

masa itu. Dialog yang terjadi pada konferensi ini dilakukan demi mengakomodasi dan memfasilitasi dialog yang terjadi diantara blok barat dan blok timur pada masa itu. Konferensi ini digelar sebanyak dua kali, yakni Konferensi Helsinki 3 July, 1973 dan Konferensi Jenewa 18 September, 1973. Hasil dari konferensi ini ialah Pacta Helsinki yang ditandatangani oleh 35 Negara anggota konferensi. Pacta Helsinki sendiri berisi mengenai perjanjian dan kesepahaman bersama dalam ranah politik-militer, ekonomi-lingkungan hidup, dan permasalahan hak asasi manusia, yang nantinya dikenal dengan nama “*Helsinki process*” (Galbreath, 2007).

Pasca keruntuhan Uni Soviet dan sekaligus menandai berakhirnya perang dingin, CSCE semakin memperlebar pengaruh dan komitmennya dalam mengatasi permasalahan dan konflik yang terjadi di Kawasan Eropa, khususnya terkait dengan permasalahan baru yang timbul pasca berakhirnya Perang Dingin di Eropa. Berdasarkan pada peningkatan komitmen ini, pada tahun 1994, tepatnya pada KTT yang dilaksanakan di Kota Budapest, Hungary, *Conference on Security and Cooperation in Europe* (CSCE) yang tadinya hanya berupa ‘konferensi’ berubah menjadi sebuah ‘organisasi’ independent, yang selanjutnya diberi nama *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE) (OSCE, 2020).

Pasca berubah menjadi organisasi independen, OSCE memperluas ranah kegiatan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Seperti, Memperkuat kerangka normatif untuk keamanan Eurasia, mempromosikan pembangunan demokrasi untuk pencegahan konflik, aktif dalam pencegahan konflik di daerah rawan konflik, dan menjadi penengah dalam konflik yang sedang berlangsung, serta turut menjadi fasilitator resolusi konflik dan pembangunan pasca konflik. OSCE saat ini memiliki lebih dari 3,460 karyawan, yang mana sebagian dari mereka bekerja secara langsung di lapangan, dengan hanya 10% dari mereka yang bekerja di Kantor Pusat, Vienna (OSCE, 2020).

Salah satu konflik populer yang ditangani oleh OSCE ialah konflik yang terjadi di Transnistria, Moldova. Dimana sejak tahun 1992, OSCE yang saat itu masih bernama CSCE sudah terjun dalam upaya mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayah Moldova tersebut. Sejarah dari konflik ini bermula dari semakin melemahnya pengaruh sampai dengan keruntuhan Uni Soviet di awal tahun 1990-an. Dimana pada saat itu, negara-negara satellite yang dimiliki Uni Soviet menyatakan kemerdekaannya masing-masing, dan tidak semua negara yang merdeka tersebut bebas dari permasalahan kedaulatan, salah satu negara yang mengalami permasalahan kedaulatan

ini adalah Moldova. Sejak masa kemerdekaannya, Moldova mengalami sebuah konflik ketika ada sekelompok golongan yang melakukan klaim atas sebagian besar wilayah Moldova, khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina. Wilayah tersebut menyatakan kemerdekaannya dari Moldova, dan ingin mendirikan negara baru dengan nama *Pridnestrovian Moldavian Soviet Socialist Republic* atau yang nantinya lebih dikenal dengan nama Transnistria (Gonta, 2014).

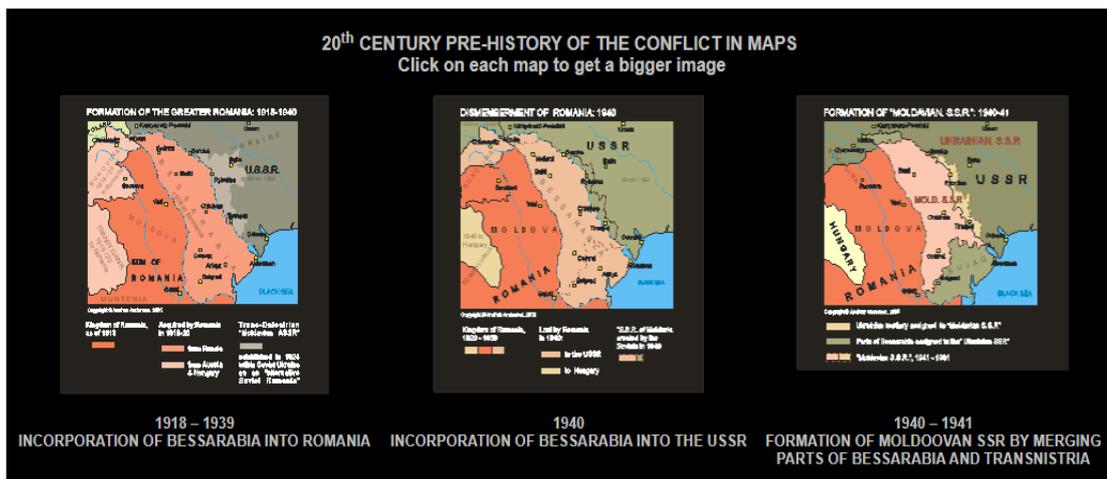


Gambar 1 : Peta Perbatasan Transnistria

Ada berbagai macam hal yang bisa menjadi kemungkinan dari terjadinya konflik ini. Jika dilihat dari sisi etnis, mayoritas masyarakat Moldova merupakan etnis moldova yang cenderung memiliki kedekatan dengan orang-orang Romania, khususnya dari segi bahasa dan budaya. Sementara itu, wilayah Transnistria merupakan wilayah yang dari segi etnis memiliki bahasa dan budaya yang berbeda, dimana Transnistria diisi oleh orang-orang Slavic yang sebagian besarnya berbudaya dan berbahasa seperti orang-orang Rusia dan Ukraina. Perbedaan etnis inilah yang menyebabkan kedua belah pihak seringkali berkonflik satu sama lain, karena Transnistria merasa bahwa mereka sejak awal adalah kelompok masyarakat yang 'berbeda', dan tidak bisa disatukan dengan orang-orang Moldova (Minority Rights Group International, 2007).

Jika ditilik dari sisi historis, kita bisa melihatnya dari berbagai macam timeline, salah satunya ialah ketika wilayah Transnistria maupun Moldova masih menjadi bagian

dari Uni Soviet. Pada masa itu, wilayah Moldova merupakan bekas wilayah Romania, yang pada masa pasca Perang Dunia I bernama Bessarabia. Wilayah Bessarabia diberikan kepada Uni Soviet pada tahun 1940, ketika Romania dianeksasi oleh Uni Soviet pasca Perang Dunia I. Selain itu, wilayah Transnistria masa kini sebelumnya adalah bagian dari wilayah Ukraina, yang mana selanjutnya wilayah Transnistria dan Bessarabia disatukan oleh Pemerintah Uni Soviet menjadi sebuah negara satellite baru yang diberi nama Moldova. Penyatuan secara paksa inilah yang menyebabkan kedua belah pihak mengalami krisis identitas, sehingga konflik masih terus terjadi hingga saat ini (Malling, 2015).



Gambar 2 : Peta Konflik Kawasan Transnistria

Permasalahan diantara kedua belah pihak terus terjadi, khususnya pada awal masa kemerdekaan Moldova. Permasalahan ini mengalami eskalasi pada tahun 1992, dimana perang saudara terjadi sehingga menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Perang saudara ini berakhir dengan gencatan senjata yang masih belum diterapkan efektif hingga saat ini. Misi yang dilakukan oleh OSCE sejak tahun 1992 dalam upaya mengatasi konflik Transnistria masih berlangsung hingga saat ini, dimana upaya penyelesaian masih terus dilakukan dalam konflik yang terjadi di wilayah Moldova tersebut. Keterlibatan OSCE dalam konflik Transnistria didasarkan pada mandate yang disetujui oleh 57 negara anggota. Sejak tahun 1992 hingga saat ini, OSCE berusaha untuk melakukan pendekatan komprehensif, dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik, menjadi penengah, dan melindungi Moldova dari segala aspek kenegaraan, seperti memperkuat kedaulatan, dan integritas wilayah Moldova yang sesuai dengan hukum internasional yang berlaku (OSCE, 2020).

Berdasarkan pada penjelasan diatas, bisa kita lihat bahwa konflik ini merupakan konflik yang cukup panjang dan menimbulkan banyak korban jiwa, serta sentiment yang bersifat etnis dan kebangsaan dari berbagai macam kalangan. Berdasarkan mandate yang diberikan, kita bisa melihat bahwa OSCE memiliki peranan yang penting dalam menangani kasus ini, oleh karenanya melihat hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti perihal Peran dan Upaya dari *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE) pada konflik Transnistria.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah **“Bagaimana upaya Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) dalam membantu menangani konflik yang terjadi di Transnistria?”**

C. Kerangka Berpikir

a. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan salah satu aktor penting dalam konteks hubungan internasional kontemporer. Banyak sekali ahli ataupun praktisi HI yang memberikan definisi mengenai pengertian dari Organisasi Internasional, salah satunya ialah yang dijelaskan oleh Pierre Gerbert yang mana beliau mendefinisikan Organisasi Internasional sebagai, *“the idea of an international organization is the outcome of an attempt to bring order into international relations by establishing lasting bonds across frontiers between governments or social groups wishing to defend their common interests, within the context of permanent bodies, distinct from national institutions, having their own individual characteristics, capable of expressing their own will and whose role it is to perform certain functions of international importance”* (Archer, 2001).

Selain itu pula, Dr. Boer Mauna menjelaskan bahwa, Organisasi Internasional merupakan sebuah badan yang terdiri dari himpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat, bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui perhimpunan itu sendiri. Sebagai badan yang berfungsi untuk bekerjasama dan memfasilitasi kepentingan masing-masing anggotanya, organisasi internasional memiliki peranan penting dalam HI Kontemporer. Keberadaan dan eksistensi dari Organisasi Internasional dapat dijadikan sebagai jembatan bagi negara-negara anggotanya untuk berdialog, sehingga menimbulkan fungsi komunikasi yang kompleks sebagai wadah artikulasi kepentingan serta dapat

memudahkan akses bagi upaya penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi, baik konflik internal maupun eksternal (Sugito, 2016).

Lebih lanjut, Harold K. Jacobson menjelaskan bahwa dalam Organisasi Internasional terdapat beberapa konsep yang menjadi dasar dari pembentukannya. Yakni, *Collective Security* dan *Disarmament and Arms Control*. Pada konsep ini menjelaskan bahwa Organisasi Internasional dibentuk dengan dasar keamanan bersama, dimana negara-negara anggota bahu-membahu untuk bekerjasama dalam mewujudkan perdamaian, baik dari sisi internal maupun eksternal. Negara-negara anggota juga melakukan control terhadap persenjataan, sehingga penggunaan alatsista militer hanya digunakan dengan tujuan yang tepat dan lebih condong kearah pertahanan diri (Jacobson, 1979).

Selain itu, berdasarkan pada Karen Mingst, pada tingkatan internasional, Organisasi Internasional memiliki beberapa fungsi utama (Mingst, 1999), yakni:

1. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama antar negara/aktor,
2. Menyediakan informasi dan pengawasan,
3. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik,
4. Mengkoordinir aktifitas internasional mengenai permasalahan bersama,
5. Menyediakan arena untuk *bargaining* bagi negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah,
6. Membentuk rezim internasional.

Organisasi internasional juga memiliki fungsi lainnya (Jacobson, 1979), yakni:

1. Fungsi Informasi

Dari sisi informasi, Organisasi Internasional memiliki keharusan untuk melakukan pertukaran informasi, pengumpulan data, Analisa, dan berbagai macam hal yang bersifat informasi yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan dari masing-masing negara anggota.

2. Fungsi Normatif

Fungsi normatif kurang lebih bisa dikatakan sebagai pembuatan rezim internasional yang harus ditaati oleh negara-negara anggotanya. Rezim yang dimaksud ialah penentuan norma dan standar (sikap) yang berlaku bagi negara-negara anggotanya.

3. Fungsi Pembuat Peraturan

Sebagai sebuah instrument yang diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan dari para anggotanya, Organisasi Internasional harus memiliki peraturan dan hukum yang bersifat legal dan mengikat. Hal ini dibutuhkan demi terwujudnya situasi yang teratur dan sesuai dengan tata cara yang berlaku, serta telah ditetapkan ataupun disepakati secara bersama-sama.

4. Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan

Organisasi Internasional juga memiliki fungsi sebagai badan pengawas, hal ini dibutuhkan demi terwujudnya program yang akan jalankan maupun yang sudah dijalankan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang berlaku.

5. Fungsi Operasional

Dari sisi operasional, Organisasi Internasional memiliki kewenangan untuk menggunakan sumber daya organisasi. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya militer, ataupun keuangan.

Melihat pada penjelasan diatas, OSCE sebagai Organisasi Internasional tentu memiliki peranan penting dalam mewujudkan perdamaian, khususnya dalam konflik yang terjadi diantara Transnistria dan Moldova. OSCE sebagai Organisasi Internasional memiliki peranan untuk menyediakan arena *bargaining* bagi kedua belah pihak, serta berfungsi sebagai pihak netral yang akan memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik. Selain itu, OSCE juga merupakan organisasi yang menjalankan fungsi operasional, dimana OSCE menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membantu penyelesaian konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak.

Selain itu, penulis merasa bahwa Fungsi yang paling cocok bagi OSCE dalam mengatasi Konflik Transnistria ada pada Fungsi Informasi, Fungsi Pembuat Peraturan dan Fungsi Operasional. Hal ini dikarenakan kedua fungsi itu merupakan fungsi yang berjalan paling optimal pada konflik kali ini.

D. Hipotesa

Berdasarkan pada Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, dan Kerangka Berpikir yang sudah penulis jabarkan diatas. Penulis mengambil hipotesis, Upaya yang dilakukan *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE) dalam membantu menangani Konflik Transnistria, yaitu:

1. Menjalankan fungsi informasi, dimana pada Konflik Transnistria, OSCE berperan penting dalam proses pengumpulan informasi, Analisa data, serta melakukan pertukaran informasi kepada dua belah pihak yang berkonflik.
2. Menjalankan fungsi pembuat peraturan dengan cara mengeluarkan Moldova Action Plan (MAP), yang dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan atas permasalahan yang terjadi di Transnistria.
3. Melakukan fungsi operasional dengan cara mengirimkan bantuan, baik berupa bantuan finansial maupun tenaga ahli yang akan membantu proses negosiasi dan perumusan resolusi konflik.

E. Metodologi Penelitian

a. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode *qualitative* yang berfokus pada Teknik *library research* atau Teknik kepastakaan. Data yang digunakan merupakan data valid yang berasal dari data sekunder, dan berasal dari sumber kepastakaan seperti buku, jurnal, surat kabar, dan sumber cetak lainnya. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber data internet seperti, tagar, situs atau website resmi, serta sumber-sumber internet lainnya yang merupakan data kredibel yang dapat menunjang proses penelitian yang dilakukan penulis.

b. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis data yang bersifat induktif. Dimana penulis akan berusaha terlebih dahulu untuk memahami fakta yang berkaitan dengan objek Analisa. Selanjutnya, fakta ini akan diubah menjadi generalisasi empiris, dan akan dilakukan perumusan masalah, preposisi, dan diubah menjadi sebuah naskah tulisan yang baik dan mudah dimengerti.

F. Batasan Penelitian

Jangkauan ataupun batasan dari penelitian ini ialah Peran dari *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE), yang mana penulis hanya akan berfokus pada Langkah-langkah ataupun upaya yang telah dilakukan oleh OSCE sejak perang saudara hingga upaya menjaga perdamaian dan pembangunan pasca konflik tahun 1992-2006.

G. Sistematika Penulisan

a. BAB I:

Merupakan BAB yang berisi tentang pendahuluan, dimana didalamnya terdapat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Berpikir, Hipotesa, Metodologi Penelitian, Batasan Penelitian, dan Sistematika Penulisan

b. BAB II:

Merupakan BAB yang akan membahas tentang OSCE secara mendalam, baik dari sisi sejarah, profil, keanggotaan, hingga misi yang diamanatkan kepada OSCE. Selain itu, BAB ini juga akan membahas tentang Konflik Transnistria secara lebih mendalam dan komprehensif.

Pada bagian ketiga pada BAB ini, penulis juga akan secara langsung menjelaskan mengenai mandat, dan peran OSCE dalam proses perdamaian di Transnistria.

c. BAB III:

Merupakan BAB terakhir yang akan berisi kesimpulan.